BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Kemajuan teknologi menjadikan komunikasi semakin canggih dimasa ini berbagai cara dilakukan setiap orang untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, begitu juga yang dilakukan dalam suatu organisasi dan pemerintahan komunikasi sangat penting untuk penunjang tercapainya suatu tujuan dari sebuah kegiatan yang dilakukan. oleh sebab itu peranan komunikasi sangat penting dalam organisasi dan pemerintahan, untuk mendapat komunikasi yang efektif perlu adanya strategi dalam berkomunikasi karena dengan strategi bisa lebih menyesuaikan konteks komunikasi yang akan dibicarakan serta bisa mengurangi hambatan dalam komunikasi itu sendiri.

Seiring dengan kemajuan teknologi di era globalisasi sekarang ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyikapi perkembangan tersebut dengan menerapakan apa yang disebut dengan *e-Government*. Penerapan *e-Government* merupakan bentuk usaha yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan *e-Government* bertujuan mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas pemerintah meningkat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia untuk dapat mengembangkan hidupnya baik dari segi politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungannya. Kebutuhan informasi sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu tidak salah jika pelayanan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak dasar dalam kehidupan manusia. Kebutuhan informasi sama halnya dengan efektivitas pembangunan daerah. Hal ini dapat ditentukan dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah selaku pejabat publik dengan masyarakat. Komunikasi yang baik dapat menciptakan adanya transparansi informasi bagi publik.

Kemajuan Sistem Informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat segera disebarkan keseluruh lapisan masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap individu dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara apapun. Pesatnya perkembangan sistem informasi menuntut kita harus selalu mengikuti *trend* sistem informasi sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu implikasi nyata yang dirasakan dari percepatan tersebut saat ini adalah munculnya berbagai bidang baru yang menuntut penguasaan teknologi informasi didalamnya. Sistem Informasi yang berkembang pesat sekarang ini sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah dimasa modern harus siap dalam melayani masyarakatnya.

Bahaya narkoba dan HIV/AIDS merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, karena permasalahan narkoba dan HIV/AIDS bukan hanya merupakan masalah dibidang kesehatan saja, akan tetapi juga menyangkut berbagai bidang antara lain bidang sosial, ekonomi, kriminal, budaya, agama dan lain-lain. Ancaman bahaya narkoba dan HIV/AIDS semakin meningkat dengan indikasi semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba tiap tahun dan dengan diketemukannya fakta bahwa bangsa Indonesia tidak lagi sebagai wilayah transit peredaran narkoba dunia, akan tetapi bangsa Indonesia telah menjadi produsen narkoba dan konsumen bagi peredaran narkoba yang sangat besar di dunia.

Mengingat besarnya ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba bagi bangsa Indonesia tersebut di atas,maka dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pemerintah telah mencanangkan “Indonesia bebas narkoba 2015”, dan membentuk sebuah badan yang berfungsi sebagai pusat koordinasi program P4GN tersebut yang berkedudukan di Jakarta yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertanggung jawab dibawah Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Kepala Kepolisian RI, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan *drug*, *demand* dan *supply reduction*, mengimplementasikan langkah-langkah pengawasan, pencegahan dan

kegiatan-kegiatan untuk mencegah, memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Salah satu tugas pokok Badan Narkotika Nasional adalah membangun Sistem Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan ,Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan, serta Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba yang bersifat informative, actual dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga diperlukan jaringan informasi sampai tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung yang akan mempercepat penyajian dan penyediaan data bagi masyarakat secara actual dan akurat.

Bidang Pengendalian Operasi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas untuk membuat program aplikasi yang disusun dalam perencanaan program kerja Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. Salah satu tugas dari rencana kerja Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab Bidang Pengendalian Operasi adalah membuat program pelayanan informasi tentang P4GN melalui *e-library.*

e-library adalah salah satu upaya dari Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan dengan mudah dan efisien dalam pelayanan informasi P4GN berbasis sistem informasi elektronik. Namun pada pelaksanaanya efektivitas dari program aplikasi e-library yang dijalankan oleh Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat belum optimal.

Masyarakat yang mengakses e-library di website Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat masih merasakan hambatan dengan teknis pada

pengoperasian *e-library.* Masyarakat harus menunggu untuk mendapatkan dan mengetahui informasi P4GN di dalam aplikasi e-library, karena artikel yang ada belum *update* setiap hari.

Dalam konten pun belum optimal, ketika masyarakat membuka artikel yang ada di dalam aplikasi *e-library*, masih sering terjadi tidak dapat dibuka, atau konten sedang tidak bisa diakses. Dengan hambatan atau permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dalam mengakses *e-library* tersebut, menjadi permasalahn utama yang harus diperbaiki oleh Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.

Sumber daya manusia pada Bidang Pengendalian Operasi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat harus lebih bekerja keras untuk mengoptimalkan kerja dari *e-library*, agar terciptanya pelayanan yang berbasis tekhnolgi yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Memfasilitasi masyarakat dengan program aplikasi e-library seharus dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap permasalahan dan bahaya penggunaan narkoba di Negara ini.

Dalam menghadapi permasalahan yang ada di BNP Jawa Barat yang bertugas menangani pengumpulan dan pengelolaan data P4GN melakukan upaya lebih proaktif untuk bias mendapatkan data-data yang dibutuhkan dari berbagai lembaga dan instansi tersebut di atas sehingga database P4GN yang akan disusun menjadi lebih lengkap.

Supaya tujuan pemerintah tercapai, maka efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus berjalan dengan baik melalui program aplikasi *e-library*. Sehingga Berdasarkan latar belakang di atas,

maka penulis mengambil judul **"Efektivitas *e-library* Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk memperjelas fokus masalah yang akan ditulis dalam penulisan ini. Penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kejelasan tujuan yang hendak dicapai *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
2. Bagaimana kejelasan strategi *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
3. Bagaimana proses analisis dan perumusan kebijakan *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
4. Bagaimana perencanaan *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
5. Bagaimana penyusunan program *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
6. Bagaimana pengadaan sarana dan prasana *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
7. Bagaimana sistem pengawasan *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan KKL

Maksud dari laporan KKL ini adalah untuk mengetahui efektifitas kerja *e- library* pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui kejelasan tujuan yang hendak dicapai *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
2. Untuk mengetahui kejelasan strategi *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui proses analisis dan kebijakan *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
4. Untuk mengetahui perencanaan *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
5. Untuk mengetahui penyusunan program *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
6. Untuk mengetahui pengadaan sarana dan prasarana *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?
7. Untuk mengetahui sistem pengawasan *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat?

1.4 Kegunaan Laporan KKL

Hasil laporan KKL ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Bagi kepentingan penulis, hasil laporan KKL ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan dan memahami peranan aparatur negara di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui efektifitas kerja e-library P4GN, sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai kesesuaian fakta dilapangan dengan teori yang ada.
2. Secara teoritis, hasil laporan KKL ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya *e-Government.*
3. Secara praktis, diharapkan laporan KKL ini dapat bermanfaat untuk aparatur negara di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dilihat dari penerapan efektifitas kerja e-library P4GN.

1.5 Kerangka Pemikiran

Upaya Efektivitas kerja terdiri dari dua kata yaitu efektivitas dan kerja. Menurut Richard M. Steers (1980 : 1), efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output). Suatu pekerjaan

dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Umumnya efektivitas selalu berhubungan dan dipadukan dengan efisiensi yang merupakan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi. Unit organisasi yang efisien belum tentu efektif, karena meskipun unit tersebut menghasilkan sejumlah keluaran dengan menggunakan masukan yang minimal atau menghasilkan keluaran terbanyak belum tentu tujuan organisasi yang maksimal, sehingga unit tersebut menjadi kurang efektif atau dengan kata lain efektivitasnya kurang memadai. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Menurut Siagian (1986:152) efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat James L. Gibson yang dikutip oleh Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

(dalam Kurniawan, 2005:107).

Keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi efektivitas *e-library* P4GN di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat dalam meningkatkan pelayanan kepada publik, hanya ada tujuh indikator yang sangat

mempengaruhi terhadap efektivitas *e-library* tersebut. Tujuh indikator tersebut, yaitu : Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Kejelasan strategi pencapaian tujuan, Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, Perencanaan yang matang, Penyusunan program yang tepat, Tersedianya sarana dan prasarana, Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Penulis mengambil tujuh indikator karena penulis menyesuaikan dengan kondisi di BNP Jawa Barat.

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai atau sasaran akhir yang hendak dicapai oleh BNP Jawa Barat dalam mewujudkan perencanaan aplikasi program P4GN.

Strategi adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif dan dalam jangka waktu yang relatif singkat serta tepat menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Hasibuan, 1996:104). Menurut Robert H. Hayes dan Steven C. Wheelwright yang dikutip oleh Alfonsus Sirait, bahwa strategi terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

1. Wawasan waktu *(time horizon)*;
   Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.
2. Dampak *(impact)*;
   Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti.
3. Pemusatan upaya *(concentration of effort)*;
   Sebuah stategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.
4. Pola keputusan *(pattern decision)*;
   Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.
5. Peresapan *(pervasiveness)*;

> Suatu strategi mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya.
> (dalam Sirait, 1991:40).

Perumusan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan

> "Pengertian perumusan kebijakan sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu". (Carl Friedrich, 1963)

Namun demikin dalam mendefinsikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penetuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan (Siagian,1994). Fungsi dari sebuah perencanaan adalah

1. Menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai tujuan.
2. Sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi pada pelaksanaan rencana yang telah disusun.
3. Merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi.
5. Memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan kerja sama/koordinasi. (Siagian, 1994:37)

Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Pengertian Sasaran dan Masalah* yang mendefinisikan program adalah suatu rencana yang pada dasarnya telah menggambarkan rencana yang konkret, yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu: (1) Sasaran, (2) Prosedur, (3) Anggaran (Hasibuan, 1996:103).

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

> "sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja"(Moenir 1992 : 119)

Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang dimaksud di atas berikut ini akan diuraikan istilah sarana kerja/fasilitas kerja yang ditinjau dari segi kegunaan menurut Moenir membagi sarana dan prasarana sebagai berikut :

> "1) Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan gunanya.

> 2) Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.
> 3) Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga"
> (Moenir 2000 : 120)

Keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian dalam ukuran efektivitas yang dikemukakan James L. Gibson yang dikutip Agung Kurniawan, merupakan satu kesatuan yang memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut diperjelas Ukasah Martadisastra dalam bukunya *Azaz-Azas Manajemen Konsep dan Aplikasinya,* menyebutkan keterkaitan antara pengawasan dan pengendalian, sebagai berikut:

> "Rencana yang baik dapat gagal apabila tidak adanya kegiatan pengendalian, yaitu mengawasi, mencocokkan dan mengusahakan supaya segenap aktivitas berlangsung sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan hasil yang dikehendaki" (Martadisastra, 2002:92).

Menurut pendapat George R. Terry dalam Sarwoto Kertodipuro mendefinisikan pengawasan, yaitu pengawasan merupakan pengarahan kepada tujuan, sehingga bersifat harapan yang menunjukan apa yang harus dilakukan. Adapun indikatornya, sebagai berikut:

1. Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar);
2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/senyatanya dikerjakan;
3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi;
4. Perbaikan atau pembetulan.
   (dalam Kertodipuro, 1985:100).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manejemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

Pada era otonomi daerah kinerja aparatur pemerintahan daerah harus lebih ditingkatkan. Terutama dengan adanya aplikasi di bidang teknologi pemerintahan yang dinamakan dengan *e-Government.* Oleh karena itu kesiapan aparatur perlu diseimbangkan dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan penerapan *e-Government*. *e-Government* itu sendiri memiliki arti menurut Edi Sutanta *e-Government* sebagai berikut

> *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah kepada bisnis atau pengusaha. (Sutanta, 2003:150).

Dengan demikian munculnya *e-Government* dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah. Karena dengan adanya aplikasi *e-Government* ini penyediaan sumber informasi, khususnya informasi mengenai kepegawaian cepat terlaksana sehinga keterbukaan menjadi lebih efektif dan tidak adanya birokrasi yang berbelit belit.

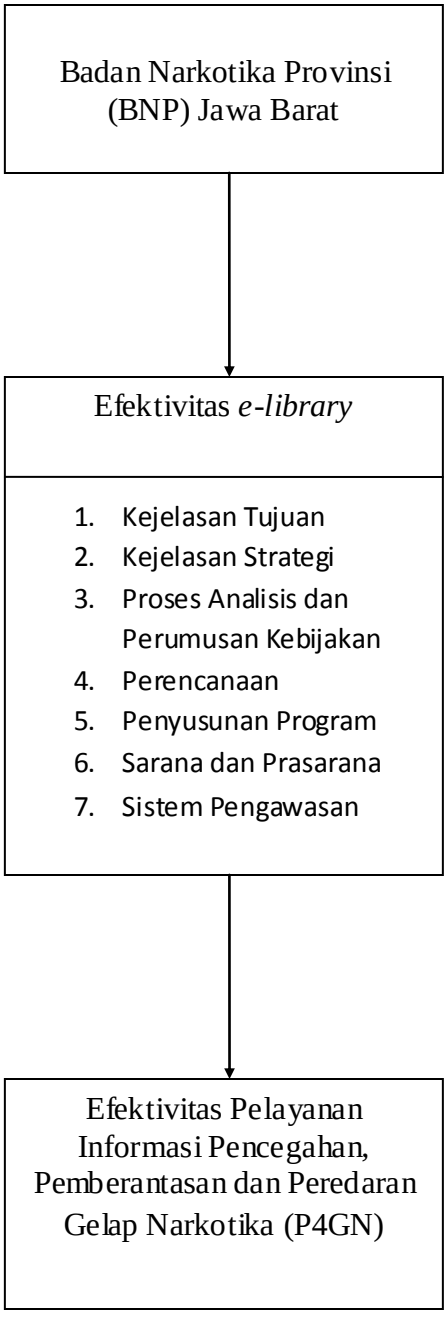
Aplikasi menurut Jogiyanto *(1999:12)*, adalah penggunaan dalam suatu komputer,instruksi *(instructiom)* atau pernyataan *(statement)* yang disusun sedemikian rupasehingga komputer dapat memproses *input* menjadi *output*. Sedangkan menurut Kamus *Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998 : 52)*, "Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atauketentuan bahasa pemrograman tertentu".

Sehingga aplikasi merupakan suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna atau rangkaian kegiatan. Program merupakan kumpulan *instruction set* yang akan dijalankan olehpemroses, yaitu berupa software. Sebuah sistem komputer diatur oleh program. Program yang mengendalikan semua aktifitas yang ada pada proses. Program berisi konstruksi logika yang dibuat oleh manusia, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sesuai dengan format yang ada pada *instruction set.* Program aplikasi merupakan program siap pakai. Program yang dirancang untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain.

e-library merupakan salah satu bentuk kemajuan di bidang teknologi informasi. Definisi teknologi informasi itu sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah serta menyebarkan informasi. (Basuki, 87). Perpustakaan elektronik juga merupakan bagian sebuah jaringan kerja (network). Dimana secara teoritis pemakai dapat memperoleh salinan elektronik sebuah dokumen, dengan ketentuan tidak ada kendala keamanan, politik, ekonomi dan social

Berdasarkan teori-teori di atas, kerangka pemikiran KKL ini dapat dilihat dalam model sebagai berikut :

Bagan 1.1
Model Kerangka Pemikiran



1.6 Metode Laporan KKL

1.6.1 Metode Laporan KKL

Metode laporan KKL yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Mohammad Nazir dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial* yang mendefinisikan metode deskriptif, sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kasus peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki"(Nazir, 1998:63).

Penulis menggunakan metode deskriptif, karena KKL ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang perenan aparatur negara dalam meningkatkan pelayanan publik dilihat dari penerapan *e-Goverment* di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah pelayanan publik. Berdasarkan metode tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Taylor dan Bogdan dalam bukunya Bagong Suyanto dan Sutinah yang berjudul *Metode Penelitian Sosial*, pendekatan kualitatif adalah: "Penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (dalam Bagong, 2005:166). Berdasarkan penjelasan dari definisi di atas, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang

mempelajari dari tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman terhadap orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapat mamahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam KKL ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan KKL, yaitu:

1. Studi Pustaka *(Library Research)*

KKL yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Menggunakan studi pustaka ini, penulis dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik KKL yang diharapkan, sehingga pekerjaan penulis tidak merupakan duplikasi.

2. Studi Lapangan *(Field Research)*

Peninjauan yang dilakukan langsung pada Badan Narkotika Provinsi BNP Jawa Barat yang menjadi objek KKL dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarnya, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date,* disamping itu penulis juga melakukan suatu KKL dengan cara sebagai berikut:

a) Observasi non partisipan

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang

mereka lakukan, sehingga penulis dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

b) Observasi partisipan

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis berada di dalam subjek yang diteliti dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga penulis dapat lebih mudah mengamati tentang data dan informasi yang diharapkan.

c) Wawancara *(Interview)* tidak terstruktur

Yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan instansi dan bagian-bagian yang menangani masalah yang ditulis. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu pihak-pihak yang terlibat pada manajemen sumber daya aparatur dalam penerapan *e-Government* melalui website di di Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat.

d) Dokumentasi

merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Dapat diartikan pula sebagai metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan KKL ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif* adalah:

Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan, reduksi data sesudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar dari informasi yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi.

Kedua, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpencar dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan antara lain, terkait dengan peningkatan manajemen sumber daya aparatur melalui sistem informasi kepegawaian.

Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpelasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada setiap tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (*spesifik*) sampai

kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum (*general*) (dalam Sugiyanto, 1992:15-20).

Penulis menggunakan analisis ini supaya dapat mengklasifikasikan secara efektif dan efisien mengenai data-data yang terkumpul, sehingga siap untuk diinterpretasikan. Disamping itu data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

1.7 Lokasi dan Jadwal KKL

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat KKL adalah Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat, yang beralamat di Jln. Cilaki No 51 Bandung 40115. Telepon (022) 7231209. *Website : http://www.bnpjabar.or.id/*

Waktu penulisan ini adalah 1 (Satu) bulan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jadwal KKL

Waktu / Kegiatan	Tahun 2011				
	Apr	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agust**
Pengajuan Judul KKL	■				
Pengajuan Usulan KKL		■			
Pengajuan surat ke tempat KKL			■		
Pelaksanaan KKL				■	
Seminar Usulan KKL					■